

**PENGUNAAN TINDAKAN KERAS SEBAGAI UPAYA DISKRESI
KEPOLISIAN DALAM PENANGKAPAN TERSANGKA
TINDAK PINDANA TERORISME**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Oleh:

YASINTA ANGGRAINI

C100130020

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2017**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGUNAAN TINDAKAN KERAS SEBAGAI UPAYA DISKRESI
KEPOLISIAN DALAM PENANGKAPAN TERSANGKA
TINDAK PINDANA TERORISME**

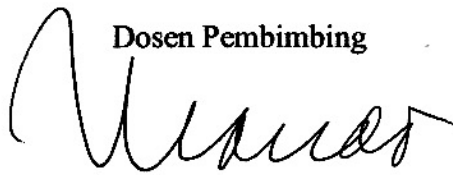
PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

YASINTA ANGGRAINI
C100130020

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



(Sudaryono, S.H, M.Hum.)

HALAMAN PENGESAHAN

PENGUNAAN TINDAKAN KERAS SEBAGAI UPAYA DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENANGKAPAN TERSANGKA TINDAK PINDANA TERORISME

Yang ditulis oleh:

YASINTA ANGGRAINI

C100130020

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Hukum

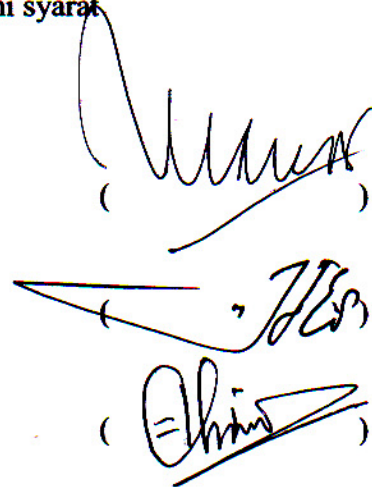
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Selasa, 18 April 2017

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Sudaryono, S.H., M.Hum.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Muchamad Iksan, S.H., M.H.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Hartanto, S.H., M.Hum
(Anggota II Dewan Penguji)



Dekan,

Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum

NIK. 536

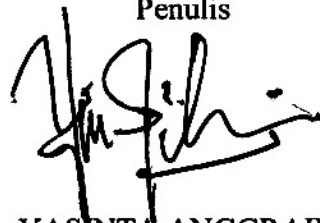
PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam makalah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 18 April 2017

Penulis



YASINTA ANGGRAINI
C100130020

PENGUNAAN TINDAKAN KERAS SEBAGAI UPAYA DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENANGKAPAN TERSANGKA TINDAK PIDANA TERORISME

ABSTRAK

Aparat penegak hukum khususnya Kepolisian dapat melakukan diskresi atau kewenangan untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri dalam melaksanakan tindakan lain yang berdasarkan kewenangannya untuk melakukan tindakan keras terhadap seorang tersangka tindak pidana terorisme demi kepentingan umum berdasarkan Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tindakan keras yang dilakukan oleh Kepolisian pada saat penangkapan tersangka tindak pidana terorisme berdasarkan peraturan perundang-undangan, diperbolehkan apabila memenuhi unsur-unsur yang sudah ada dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Penggunaan kekuatan dalam tindakan Kepolisian diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam tindakan Kepolisian. Sebagai acuan yang digunakan setiap anggota Polri, termasuk Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan yang berorientasi pada Hak Asasi Manusia (HAM) diatur secara khusus dalam Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kata Kunci: diskresi Kepolisian, terorisme, tindakan keras

ABSTRACT

Law enforcement officials, especially the police can do a discretion or authority to act according to his own judgment in carrying out other actions based on their authority to carry out a crackdown on an alleged criminal act of terrorism in the public interest under Article 18 of Law No. 2 of 2002 on the Indonesian National Police. The crackdown carried out by police during arrests of suspected criminal acts of terrorism under the rules of law, it is permissible if it meets the elements that already exist in the provisions of the legislation. Use of force in policing actions stipulated in the Indonesian National Police Chief, No. 1 of 2009 on the Use of Force in police action. As a reference use any members of the police, including the Special Detachment (Densus) 88 Anti Terror in the execution of their duties in the field oriented Human Rights (HAM) regulated under Police Chief Regulation No. 8 of 2009 on the Implementation of Standards and Human Rights in the Implementation The task of the Indonesian National Police.

Keywords: *police discretion, terrorism, crackdown*

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana terkandung pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum sebagai salah satu tiang penyangga utama yang kuat berdiri tegak, menjaga keutuhan dan keselamatan bangsa Indonesia dari ancaman bahaya seperti kasus-kasus yang mengemuka saat ini salah satunya adalah terorisme yang hanya bisa dieleminir apabila hukum berdiri tegak diatas semua kepentingan politik dan golongan.¹ Negara memiliki perangkat alat negara sebagai penegak hukum, dalam memberantas kejahatan terorisme, yaitu lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) sebagai alat negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.² Seorang anggota Polri dalam melaksanakan tugas dan penyelenggaraan fungsi Kepolisian menggunakan kemampuan profesinya, haruslah tunduk pada kode etik profesi sebagai landasan moral ketika menghadapi beragam kejahatan yang menjadi tanggung jawabnya.³

Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri sebagai Kesatuan khusus yang menangani kasus terorisme di Indonesia di bawah kendali Kepala Badan Reserse Kriminal Polri yang melakukan pengejaran, pengungkapan, penangkapan para pelaku terorisme di Indonesia dan bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melakukan upaya deradikalisme terhadap pelaku-pelaku teror yang sudah tertangkap serta kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki kecenderungan radikal.⁴ Dalam menangani tindak kriminal tak luput dari satu hal penting, yaitu adanya diskresi Kepolisian⁵, diskresi tersebut diatur dalam Pasal 18 UU No.2 Tahun 2002. Tindakan keras yang dilakukan Kepolisian haruslah tetap berdasarkan peraturan hukum yang berlaku dan

¹Dedi Prasetyo, 2014, *Diskresi Kepolisian pada Tahap Penangkapan Tersangka Terorisme*, Malang: Universitas Brawijaya Press, hal. 23.

²*Ibid.*, hal.15.

³Muhammad Nuh, 2011, *Etika Profesi Hukum*, Pustaka Setia Offset, hal.134.

⁴Dedi Prasetyo, *Op.Cit*, hal.5.

⁵Welker.S mendefinisikan diskresi sebagai wewenang yang diberikan hukum untuk bertindak dalam situasi khusus sesuai dengan penilaian dan kata hati instansi atau petugas itu sendiri, dalam Buku A. Josias Simon Runturambi dan Arin Sri Pujiastuti, 2015, *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hal.123.

menghormati HAM, maka akan menjadi suatu masalah apabila pelaksanaan diskresi ini justru memudahkan penyalahgunaan kekuasaan oleh polisi.

Sebagaimana kasus yang menimpa Siyono tersangka teroris di Klaten, Jawa Tengah, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai ada yang tidak wajar dalam kasus kematian Siyono. Apalagi, kondisi fisik jenazah Siyono penuh dengan luka dan lebam akibat tindakan kekerasan dan penyiksaan. Dalam keterangan pers di Mabes Polri, dinyatakan bahwa penyebab kematian Siyono akibat benturan saat Siyono melakukan perlawanan kepada anggota Densus 88.⁶ Dalam kasus tersebut ditemukan adanya tindakan keras yang dilakukan oleh seorang penyidik dalam penangkapan tersangka terorisme yang menyebabkan tersangka meninggal dunia. Hal tersebut menimbulkan kontra dalam masyarakat terhadap tindakan yang dilakukan oleh seorang aparat Kepolisian, yang diasumsikan telah merampas Hak Asasi Manusia (HAM).

Pada dasarnya berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peraturan perundang-undangan yang komprehensif bagi tindakan diskresi Kepolisian, mengetahui pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan anggota Kepolisian menggunakan wewenang diskresi dalam penangkapan tersangka tindak pidana terorisme, dan mengetahui pelaksanaan diskresi Kepolisian yang berorientasi terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan penulis berdasarkan fokus penelitian adalah penelitian hukum normatif.⁷ Tujuan utama dari penelitian ini adalah memperoleh pengetahuan yang mendalam berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tindakan keras Kepolisian sebagai upaya diskresi

⁶KOMPAS.com, Sabtu, 26 Maret 2016, 15:18 WIB: *Kontras Duga Densus 88 Lakukan Pelanggaran HAM terhadap Siyono* dalam <http://nasional.kompas.com/read/2016/03/26/1518371/Kontras.Duga.Densus.88.Lakukan.Pelanggaran.HAM.terhadap.Siyono>, diunduh Sabtu 24 September 2016 pukul 22:08.

⁷Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hal 93.

dalam penangkapan tersangka tindak pidana terorisme yang dilakukan dengan studi kepustakaan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Penggunaan Tindakan Keras sebagai Upaya Diskresi Kepolisian dalam Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Menurut *US Central Intelligence Agency* (CIA), terorisme adalah ancaman atau penggunaan kekerasan untuk tujuan politik yang dilakukan oleh individu atau kelompok, atas nama atau menentang pemerintah sah, dengan menakut-nakuti masyarakat lebih luas daripada korban langsung teroris.⁸ Dalam *Black's Law Dictionary*, terorisme adalah kegiatan yang melibatkan unsur kekerasan atau yang menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan manusia yang melanggar hukum pidana, yang jelas dimaksudkan untuk mengintimidasi penduduk sipil, memengaruhi kebijakan pemerintah, dan memengaruhi penyelenggaraan dengan cara penculikan atau pembunuhan⁹.

The Arab Convention for Suppression of Terrorism, menentukan bahwa teror adalah tindakan atau ancaman kekerasan apapun motif dan tujuannya, yang dilakukan untuk menjalankan agenda kejahatan individu atau kolektif yang menyebabkan kepanikan di tengah masyarakat, perasaan rasa takut dengan melukai mereka atau mengancam kehidupan, kebebasan, atau keselamatan, atau bertujuan untuk mengancam sumber daya nasional.¹⁰

Tindak pidana terorisme memiliki unsur-unsur yaitu *Pertama*, terorisme merupakan tindakan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, *Kedua*, kekerasan tersebut adalah bersifat melawan hukum. *Ketiga*, tindakan kekerasan ditujukan kepada seseorang atau kelompok atau kepada harta benda

⁸Mahrus Ali, 2012, *Hukum Pidana Terorisme: Teori dan Praktik*, Jakarta: Gramata Publishing, hal.3, dalam Buku Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Pidana Khusus: Memahami delik-delik diluar KUHP*, Jakarta: Prenadamedia Group, hal.105.

⁹Wahid, Sunardi, 2004, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, Hukum*, Bandung: Refika Atitama, hal 2.

¹⁰Ari Wibowo, 2012, *Hukum Pidana Terorisme: Kebijakan Formulatif Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Teroroisme di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hal.64.

atau fasilitas publik *Keempat, adreast* utama dari tindakan terror itu adalah untuk mengubah ideologi dan haluan politik negara.

Penangkapan tersangka tindak pidana terorisme dilakukan oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol: Kep/30/VI/2003 tanggal 30 Juni 2003. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan mengenai tugas pokok dan kewenangan Kepolisian yang diamanatkan oleh undang-undang dalam melaksanakan penyidikan untuk menegakkan hukum pidana yaitu dengan melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan sampai dengan penyitaan serta melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Kewenangan yang diberikan oleh undang-undang Polri dalam melakukan penyidikan juga tersirat dalam Pasal 16 ayat (1) KUHAP.

Pasal 17 KUHAP mengatur mengenai persyaratan penangkapan. Khusus dalam hal penangkapan terhadap tersangka tindak pidana terorisme diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yaitu bahwa: "*Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup.*" Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) untuk paling lama 7x24 (tujuh kali dua puluh empat jam). Bukti permulaan yang dijelaskan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tersebut adalah:

- “(1) untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan setiap laporan intelijen;
- (2) penetapan bahwa sudah dapat atau diperoleh bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) harus dilakukan proses pemeriksaan oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri.”

Selanjutnya, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Kepolisian diberikan legalitas berupa tindakan diskresi yaitu bertindak secara bebas menurut penilaian maupun pertimbangannya sendiri sebagaimana termaktub dalam Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa:

- (1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.*
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.*

Sementara itu, dalam Pasal 18 ayat (2) menjelaskan bahwa Polisi dalam menjalankan tugas kewenangannya dalam hubungan dengan masyarakat perlu memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selanjutnya, dalam kasus tersangka tindak pidana terorisme bernama Siyono. Kapolri Jendral Badrodin Haiti menjelaskan Kronologi kematian terduga teroris Siyono saat rapat kerja dengan Komisi III DPR. Dia memaparkan pelanggaran prosedur anggota Densus 88 Terkait Siyono. Badrodin mengatakan, saat kejadian pada 10 Maret 2016, Siyono dibawa dua anggota Densus 88 untuk menunjukkan lokasi penyimpanan senjata. “Siyono tidak diborgol karena diharapkan dapat bekerja sama. Sekitar pukul 12.30 WIB, melintas di jalan lintas Klaten-Prambanan, Siyono menyerang petugas yang hanya satu orang. Perkelahian tidak bisa dihindari,” kata Badrodin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/4/2016).

Dia menyatakan, saat itu Siyono menyerang petugas yang menjaga dirinya, serangan Siyono tersebut juga mengenai petugas yang sedang menyetir mobil. “Tersangka terus menyerang dengan menyikut, menendang, dan mencoba merampas senjata api. Tendangannya kena ke bagian belakang kepala pengemudi sehingga kendaraan sempat oleng ke kanan tapi tetap bisa melanjutkan perjalanan,” papar Badrodin. “Namun akhirnya pengawal berhasil melumpuhkan tersangka. Tersangka dalam keadaan tertunduk lemas”, kata Badrodin. Situasi saat itu tidak memungkinkan untuk menepi, lalu Siyono pun dibawa ke IGD RS Bhayangkara Yogyakarta tapi nyawanya tidak tertolong. “Pemeriksaan luar berdasarkan permintaan penyidik Densus 88, ada luka memar kepala sisi kanan

belakang dan pendarahan di bawah selaput otak belakang kanan. Fraktur tulang iga kelima ke depan. Semua karena kekerasan benda tumpul”, ujar dia. Badrodin menegaskan, tewasnya Siyono juga membawa kerugian untuk Polri karena dia memiliki banyak keterangan soal jaringan terorisme yang dibutuhkan Kepolisian.¹¹

Perlakuan tersangka yang melakukan perlawanan saat penangkapan menjadikan anggota Densus menggunakan kekuatan dalam tindakan Kepolisian yang tidak sengaja mengakibatkan tewasnya tersangka. Tindakan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum apabila sangat beralasan dan dilakukan dengan memperhatikan kode etik serta peraturan perundang-undangan.

Penggunaan kekuatan dalam tindakan Kepolisian diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam tindakan Kepolisian. Pasal 2 ayat (1) Tujuan Peraturan ini adalah untuk memberi pedoman bagi anggota Polri dalam pelaksanaan tindakan Kepolisian yang memerlukan penggunaan kekuatan, sehingga terhindar dari penggunaan kekuatan yang berlebihan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Mengenai standar perilaku petugas/anggota Polri dalam tindakan Kepolisian termaktub dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga tindakan keras yang dilakukan oleh Kepolisian pada saat penangkapan tersangka tindak pidana terorisme, diperbolehkan apabila memenuhi unsur-unsur yang sudah ada dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal tersebut, dikarenakan Polisi memiliki kewenangan untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri dalam melaksanakan tindakan lain yang berdasarkan kewenangannya untuk melakukan tindakan keras terhadap seorang tersangka tindak pidana terorisme demi kepentingan umum. Tindakan seorang Polisi yang demikian tidak dapat disalahkan apabila telah sesuai dengan ketentuan peraturan

¹¹ Liputan6.com, 20 April 2016, 16:48 WIB: *Kronologi Kematian Terduga Teroris Siyono Versi Kapolri*, dalam <http://m.liputan6.com/news/read/kronologi-kematian-terduga-teroris-siyono-versi-kapolri>, diunduh Kamis 4 April 2016 pukul 13.:08 WIB.

perundang-undangan, sebagaimana bunyi dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Hukum Pidana yang menyatakan bahwa: “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang telah ada”. Bagi anggota Polisi yang melanggar Kode Etik Profesi Kepolisian dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya diatur dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 11 mengenai Penegakan Kode Etik Profesi.

3.2. Penggunaan Diskresi Kepolisian Seorang Penyidik dalam Pelaksanaan Penangkapan yang Berorientasi Pada Hak Asasi Manusia (HAM)

Menurut ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) KUHAP, memberikan wewenang kepada penyidik yang karena kewajibannya dapat melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab, “tindakan lain” ini dibatasi dengan syarat seperti yang diatur dalam penjelasan Pasal 5 huruf a angka 4 KUHAP yaitu: Yang dimaksud dengan “tindakan lain” adalah tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat: (a) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; (b) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan; (c) tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; (d) atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa; dan (e) menghormati hak asasi manusia.

Sementara itu, dalam menggunakan wewenang diskresi setiap anggota Kepolisian tidak boleh sembarangan tanpa alasan yang rasional dan logis, akan tetapi selektif dan proposional dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Maka saat melakukan penangkapan aparat Kepolisian wajib mempertimbangkan hal-hal sebagaimana ketentuan dalam Pasal 16 yaitu: (1) Dalam melaksanakan penangkapan wajib dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut: (a) keseimbangan antara tindakan yang dilakukan dengan bobot ancaman; (b) senantiasa menghargai/menghormati hak-hak tersangka yang ditangkap; dan (c) tindakan penangkapan bukan merupakan penghukuman bagi tersangka; (2) Tersangka yang telah tertangkap tetap diperlukan sebagai orang belum tentu bersalah sampai terbukti bersalah di pengadilan (asas praduga tak bersalah).

Kewajiban setiap anggota Kepolisian dalam penegakan hukum melalui pemberantasan tindak pidana terorisme harus tetap menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Dijelaskan pula dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 bahwa pemberantasan tindak pidana terorisme merupakan kebijakan dan langkah-langkah strategis untuk memperkuat ketertiban masyarakat, dan keselamatan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, tidak bersifat diskriminatif, baik berdasarkan suku, agama, ras, maupun antar golongan.

Sebagai acuan yang digunakan setiap anggota Polri, termasuk Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan yang berorientasi pada Hak Asasi Manusia (HAM) diatur secara khusus dalam Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tersangka merupakan pihak yang rentan dilanggar hak-haknya mendapatkan perhatian yang khusus sebagai mana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 pada BAB IV, yaitu: (1) Prinsip praduga tak bersalah, (2) Hak tersangka, (3) Hak untuk diadili secara adil, dan (4) Penghormatan martabat dan privasi seseorang.

Pemberantasan tindak pidana terorisme merupakan salah satu tugas Kapolri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berlandaskan HAM, sehingga sangat penting dipahami dan dipatuhi oleh Densus 88 khususnya tentang Penggunaan Kekuatan/Tindakan Keras dan Senjata Api. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 28 Tahun 2009 pada BAB V. Dalam Pasal 45 ditegaskan agar setiap petugas Polri dalam melakukan tindakan dengan kekuatan/tindakan keras harus memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal berikut: (a) tindakan dan cara-cara tanpa kekerasan harus diusahakan terlebih dahulu; (b) tindakan keras hanya diterapkan apabila sangat dipelukan; (c) tindakan keras hanya diterapkan untuk tujuan penegakan hukum yang sah; (d) tidak ada pengecualian atau alasan apapun yang dibolehkan untuk menggunakan kekerasan yang tidak berdasarkan hukum; (e) penggunaan kekuatan dan penerapan tindakan keras harus dilaksanakan secara proporsional

dengan tujuannya dan sesuai dengan hukum; (f) penggunaan kekuatan, senjata, atau alat dalam penerapan tindakan keras harus berimbang dengan ancaman yang dihadapi; (g) harus ada pembatasan dalam penggunaan senjata/alat atau dalam penerapan tindakan keras; dan (h) kerusakan dan luka-luka akibat penggunaan kekuatan/tindakan keras harus seminimal mungkin.

Pengaturan mengenai hak asasi manusia, khususnya yang ada kaitannya dengan hak-hak tersangka yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca amandemen adalah Pasal 28 A, Pasal 28 B (2), Pasal 28 G (1), Pasal 28 G (2), Pasal 28 I, Pasal 28 J. Untuk melindungi hak asasi manusia Indonesia memiliki undang-undang yang khusus yaitu Undang-Undang Nomor.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Pertama, Tindakan keras yang dilakukan oleh Kepolisian pada saat penangkapan tersangka tindak pidana terorisme berdasarkan peraturan perundang-undangan, diperbolehkan apabila memenuhi unsur-unsur yang sudah ada dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut, dikarenakan berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Polisi memiliki kewenangan untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri, dalam melaksanakan tindakan lain yang berdasarkan kewenangannya untuk melakukan tindakan keras terhadap seorang tersangka tindak pidana terorisme demi kepentingan umum. Penggunaan kekuatan dalam tindakan Kepolisian diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam tindakan Kepolisian. Mengenai standar perilaku petugas/anggota polri dalam tindakan Kepolisian termaktub dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 12 dan 15. Tindakan seorang Polisi yang demikian tidak dapat disalahkan apabila telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

sebagaimana bunyi dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Hukum Pidana yang menyatakan bahwa:” Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang telah ada”. Bagi anggota Polisi yang melanggar Kode Etik Profesi Kepolisian dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya diatur dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kedua, penggunaan diskresi Kepolisian seorang penyidik dalam Pelaksanaan penangkapan yang berorientasi pada Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) KUHAP, memberikan wewenang kepada penyidik yang karena kewajibannya dapat melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab, “tindakan lain” ini dibatasi dengan syarat seperti yang diatur dalam penjelasan Pasal 5 huruf a angka 4 KUHAP. Sebagai acuan yang digunakan setiap anggota Polri, termasuk Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan yang berorientasi pada Hak Asasi Manusia (HAM) diatur secara khusus dalam Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, tentang Penggunaan Kekuatan/Tindakan Keras dan Senjata Api telah diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 28 Tahun 2009.

4.2. Saran

Pertama, kepada aparat penegak hukum, sebagai aparat penegak hukum anggota Kepolisian Republik Indonesia dalam menggunakan tindakan keras sebagai upaya diskresi dalam penangkapan tersangka tindak pidana terorisme hendaklah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedua, kepada pihak Kepolisian, dalam penggunaan diskresi setiap anggota Kepolisian haruslah menghormati dan tetap berorientasi pada Hak Asasi Manusia (HAM).

Ketiga, dalam penegakan hukum di Indonesia setiap aparat penegak hukum khususnya anggota Kepolisian Republik Indonesia tetap memperhatikan keadilan agar kesejahteraan masyarakat tetap terjaga.

PERSANTUNAN

Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya orang tua tercinta yang telah memberikan kasih sayang serta doanya, sehingga saya bisa menyelesaikan kuliah ini, dekan dan pembimbing yang telah memberikan masukan dan arahan dalam pembuatan skripsi ini, dosen-dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang selama ini sudah mendidik dan membantu segala sesuatunya selama di perkuliahan, *kelima*, sahabat-sahabatku tercinta yang selalu memberikan dukungan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Mahrus. 2012. *Hukum Pidana Terorisme: Teori dan Praktik*, Jakarta: Gramata Publishing.
- Mahmud Marzuki, Peter. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Nuh, Muhammad. 2011. *Etika Profesi Hukum*. Pustaka Setia Offset.
- Prasetyo, Dedi. 2014. *Diskresi Kepolisian pada Tahap Penangkapan Tersangka Terorisme*, Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Renggong, Ruslan. 2016. *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-delik di luar KUHP*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ruturambi, A. Josias Simon dan Arin Sri Pujiastuti. 2015. *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Wahid, Sunardi, 2004, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, Hukum*, Bandung: Refika Atitama.
- Wibowo, Ari. 2012. *Hukum Pidana Terorisme: Kebijakan Formulatif Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Internet/Websit

- KOMPAS.com, Sabtu, 26 Maret 2016, 15:18 WIB. *Kontras Duga Densus 88 Lakukan Pelanggaran HAM terhadap Siyono* dalam <http://nasional.kompas.com/read/2016/03/26/1518371/Kontras.Duga.Densus.88.Lakukan.Pelanggaran.HAM.terhadap.Siyono>, diunduh Sabtu, 24 September 2016 pukul 22:08.

Liputan6.com, 20 April 2016, 16:48 WIB: *Kronologi Kematian Terduga Teroris Siyono Versi Kapolri*, dalam <http://m.liputan6.com/news/read/kronologi-kematian-terduga-teroris-siyono-versi-kapolri>, diunduh Kamis 4 April 2016 pukul 13:08 WIB.